

Urgensi Membumikan Pancasila

SENGAJA atau tidak disengaja, guyonan yang berujung pelecehan terhadap lambang negara 'Pancasila' oleh salah satu selebritas tanah air semakin mempertegas memudarnya pemahaman publik terhadap Pancasila. Narasi tersebut seolah ingin menegaskan bahwa riwayat Pancasila kini hanya tinggal 'slogan tanpa makna'. Selain itu, kasus tersebut ingin menjelaskan kepada kita bahwa mulai dari para elite politik hingga masyarakat awam 'sakralitas Pancasila' sudah mulai memudar dalam benak publik. Itu mengapa kemudian, banyak pihak yang menilai bahwa Pancasila hingga saat ini kian menjadi slogan kosong belaka.

Hal itu ditandai dari semakin memudarnya nilai-nilai Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang berakibat menguatnya sejumlah kasus kesenjangan sosial, radikalisasi dan intoleransi. Yang ada hanyalah kontestasi adu otot, kekerasan dan pemaksaan kehendak. Padahal, hakikat nilai-nilai Pancasila selain menjadi pedoman hidup berbangsa, sekaligus dapat menjadi acuan membangun persatuan, kesatuan, keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi, alih-alih menjadikan Pancasila sebagai pegangan dan ideologi bangsa. Ironisnya, justru pascareformasi 1998, sindrom amoralitas kian menggerus ideologi Pancasila sebagai pegangan hidup bernegara dan berbangsa.

Sindroma Amoralitas

Akibatnya, nilai-nilai teladan yang termaktub dalam Pancasila kian menjadi barang mewah dan tergantung dengan menguatnya sindrom amoralitas. Sebuah jajak pendapat menilai Pancasila masih sebatas retorika. Hal itu tampak dari semakin merebaknya sindrom amoralitas seperti praktik korupsi-suap dan perilaku amoral lainnya yang dapat menjadi ancaman bagi keberadaan ideologi Pancasila. Sindrom amoralitas inilah yang dapat menggerogoti dan menghancurkan sendi-sendi keberdayaan hidup berbangsa.

Nahasnya lagi, elite politik yang seolah-olah mengamalkan ajaran Pancasila dari sila ke sila.

Bambang Arianto

Nyatanya, acap kali melakukan politik kamufase untuk membohongi dan membodohi rakyat. Pancasila kemudian hanya dijadikan sebagai bumper politik demi mengejar kepentingan pragmatisme. Artinya, jika sindrom amoralitas ini tetap dibiarkan mengerus, tidak tertutup kemungkinan di masa yang akan datang, semangat pengabdian dengan mengutamakan kepen-



KR-JOKO SANTOSO

tingan bangsa dan negara yang bersemayam dalam ideologi Pancasila akan semakin menghi- lang dalam nalar politik anak bangsa.

Apalagi, hingga saat ini potret buram dalam kehidupan negara telah menjadi cermin bobroknya negara yang kerap menegasikan cita-cita kesejahteraan bersama. Hal itu tampak dari masih ditemukannya sebagian rakyat yang masih mengalami berbagai penderitaan, kemiskinan dan penindasan. Artinya, kemerdekaan yang telah diraih hampir satu abad, nyatanya belum mampu dimanfaatkan dengan baik untuk membentuk manusia dan bangsa yang merdeka. Artinya, kemerdekaan yang telah di-

raih hampir satu abad, nyatanya belum mampu dimanfaatkan dengan baik untuk membentuk manusia dan bangsa yang merdeka. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila yang sejatinya diperuntukkan dari rakyat untuk rakyat, semakin bergeser dari rakyat oleh rakyat untuk kepentingan elite dan golongan.

Kontekstualisasi

Sudah saatnya pemerintahan Joko Widodo, elite politik, tokoh masyarakat dan agamawan punya tanggung jawab bersama untuk segera mendorong upaya aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Salah satunya dengan membumikan Pancasila melalui kontekstualisasi sila-sila Pancasila dalam aktivitas sehari-hari. Urgensi membumikan Pancasila dipercaya dapat menjadikan Pancasila bukan sekadar nilai-nilai melainkan ideologi terbuka yang dapat diterima dan dipahami bersama oleh publik.

Jika hal ini dapat terlaksana dengan simultan, maka cita-cita membumikan Pancasila akan menjadi alternatif menyadarkan kita semua untuk lebih mencintai tanah air, lebih sigap bergerak, bahu-membahu mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bangsa. Walhasil, urgensi membumikan Pancasila juga diharapkan selaras dengan gerakan revolusi mental yang saat ini tengah menjadi gerakan nasional. Sehingga ke depan tidak lagi kita temui publik figur maupun 'siapa pun' yang lupa akan susunan sila-sila Pancasila. Baik sengaja maupun tidak sengaja. □ - o

**) Bambang Arianto,*

*Peneliti Bulaksumur Empat, Mahasiswa S2
Jurusan Politik dan Pemerintahan (S2)
JPP Fisipol UGM.*

Maksimum 600 Kata

PARA pengirim naskah Opini KR harap membatasi panjang naskah maksimum 4.000 karakter atau setara sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat dan nomor telepon. Naskah harap dikirim ke alamat email opinikr@gmail.com

Refleksi Hari Penyiaran Nasional

MASIH banyak masyarakat yang belum mengerti bahwa tanggal 1 April merupakan Hari Penyiaran Nasional ke-83. Dapat dimaklumi karena penempatan Hari Penyiaran Nasional baru dideklarasikan di Solo 6 tahun yang lalu. Dalam sejarah, kelahiran penyiaran milik pribumi asli

Edwi Arief Sosiawan

pemenang tender (multiplexing provider) yang berasal dari kalangan pengusaha (swasta). Menyerahkan penataan frekuensi kepada pihak swasta bukan saja bertentangan dengan UU

didik bahkan tidak jelas format acaranya serta stasiun televisi yang tayangannya 30% lebih justru berisi tayangan impor. Melihat fenomena tersebut dan berdasar pada UU Penyiaran (32/2002) sudah selayaknya uji publik sebagai representasi Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang juga tercantum dalam PP 50 Tahun 2005

Revolusi Kaum Muda

JIKA dilihat dari kekinian ide Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, tampak sederhana yakni: satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Tetapi, sebagai sebuah peristiwa bersejarah, Sumpah Pemuda merupakan refleksi munculnya kaum muda yang kini jauh lebih terdidik. Artinya, sejatinya kaum muda saat ini mampu menyambut dunia dengan keragaman, dan mengisinya dengan pelbagai kreativitas di tengah krisis multidimensi yang mendera bangsa ini.

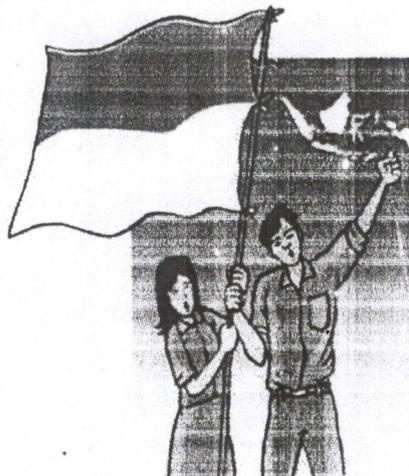
Ironisnya, kaum muda saat ini kerap terjebak dalam jejaring pencitraan politik dan tersandera moralitas kekuasaan. Kaum muda seakan tidak mampu menjadi spasi alternatif bagi perubahan dalam membangun satu aliansi strategis guna memperbaiki bangsa ini. Hal ini berbanding terbalik jika dibandingkan generasi 20-an, yang mana kaum muda cukup berhasil mengatasi sekat-sekat primordial dan mengedepankan identitas ideologi kebangsaan. Bahkan, tampilnya sejumlah tokoh muda saat ini yang sempat digadang-gadang membawa harapan dan perubahan baru justru menjadi aktor pembusukan demokrasi.

Hal ini mengkonfirmasi jika reformasi 1998 sesungguhnya telah gagal melahirkan revolusi kaum muda. Terbukti, beberapa periode kontestasi elektoral dan presidensial, hegemoni politik kaum tua masih sangat dominan. Artinya, secara politik, kerja-kerja teritorial dan kebersamaan kaum muda memang belum terang kelihatannya. Kaum muda masih mengalami pergumulan dalam menciptakan perubahan, baik di dalam dirinya maupun di luar dirinya.

Momentum revolusi kaum muda kian mepiis seiring menguatnya hegemoni dan derasnya konsolidasi kaum oligarki warisan Orde Baru—yang menempatkan kaum tua terus berkuasa di posisi puncak partai politik. Kooptasi dinasti politik dan dominasi kuasa oligarki politisi tua terhadap partai, kian menyebabkan peluang revolusi kaum muda tidak menentu. Hegemoni patronase kaum tua, mengindikasikan terus merebaknya upaya pengkerdilan regenerasi politik kaum muda.

Bambang Arianto

Apalagi, keengganan untuk menyerahkan estafet kepemimpinan pada kaum muda, telah menjadi identitas struktur, bahkan kultur politik kita. Hal ini dibenarkan oleh Benedict R O'G Anderson dalam 'Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance', 1944-1945, yang menilai revolusi kaum muda akan gagal jika yang tampil di permukaan adalah kaum muda yang tidak otentik—bernalar pragmatis bahkan sangat miskin dari karakter-mental kebangsaan.



KR. JOJO SANTOSO

Semenjak kemunculan Joko Widodo (Jokowi) sebagai representasi kaum muda, akhirnya telah mampu menjadi penanda revolusi kaum muda. Apalagi, Jokowi telah mampu melawan pola dan warisan budaya politik lama yang kerap merusak citra dan kredibilitas kaum muda. Bahkan, sosok Jokowi telah menjadi simbolisasi revolusi kaum muda yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya merestorasi warisan budaya gotong royong yang mulai pudar. Serta mengembangkannya dalam pengertian yang lebih luas. Sebut saja, pengembangan budaya tolong-menolong dengan

semangat koperasi.

Jokowi acap kali menekankan jika kaum muda harus dijadikan sumber daya terpenting, asalkan mampu saling menguatkan sisi pengetahuan subjektif, keahlian, karakter serta moralitas. Pengetahuan subjektif merujuk pada ideologi yang berisi konsep tentang apa yang baik dan buruk sebagai upaya membangun habitus kepemimpinan transformatif.

Mental dan karakter dalam konteks ini ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan menahan diri dari godaan pemborosan dan penyelewengan dana publik, serta mencegah perilaku yang memperlemah penegakan hukum dalam menciptakan keadilan. Itulah mengapa gagasan revolusi mental akan menyasar karakter personal dan budaya termasuk—sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku sebagai pembentuk karakter kolektif. Artinya, karakter kolektif ini menekankan upaya penguatan mentalitas budaya kemandirian, gotong royong, dan pelayanan.

Dengan prioritas dan pendekatan seperti ini, revolusi kaum muda secara sinergis dan simultan bisa membawa perubahan mendasar pada struktur mental dan keyakinan bangsa. Perubahan ini akan mendorong kita lebih siap berdaya dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Oleh sebab itu, peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober dan tampilnya Jokowi sebagai pemimpin harapan baru, dapat menjadi awal yang baik bagi revolusi kaum muda untuk dapat tetap meneruskan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional—yang selama ini tergerus dan terdegradasi dalam pusaran patronase politik. □ - c

**) Bambang Arianto, Peneliti Politik Bulaksumur Empat dan Mahasiswa S2 JPP Fisipol UGM Yogyakarta.*

Maksimum 600 Kata

PARA pengirim naskah Opini KR harap membatasi panjang naskah maksimum 4.000 karakter atau setara sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat dan nomor telepon. Naskah harap dikirim ke alamat email opini.kr@gmail.com

Menyoal Kampanye Pilkada Serentak

DIRI

Jung rakhir

nya melihat begitu
sibah selama musim
maah harus meng-
cam cobaan. Mulai
hujan es, hingga badai
at sore di Jeddah dan

ari badai reda, terjadi
h dan menimpa atap
g begitu agung karena
akbah itu bersimbah
ng meninggal dan ra-
luka-luka dengan kon-
arannya tidak utuh lagi.
mtu rangkaian ritual
jalani. Jamaah pun
k haji, yakni wukuf
gsung Rabu (23/9).

ngklian haji selesai,
uang. Lebih dari 700
berdesak-desakan di
ut bermalam di Mina

memang sudah takdir
ya meninggal dalam
ejatinya terlihat betapa
ngaturan jamaah haji.
put lain yang menjadi
berada di Arab Saudi.
pun perintah Tuhan
kasi itu murni dimiliki

PROSES pemilihan kepala da-
erah (pilkada) serentak tentu bukan
sekadar ajang perebutan kekuasaan.
Tapi, bagaimana ritual lima tahunan
tersebut dapat membawa muatan
edukasi dan pendidikan politik
di balik keramaian massa atribut
kampanye.

Pasalnya, selama ini model kam-
panye lebih banyak menyerupai
pengerahan massa (*bandwagon*)
yang akhirnya menggiring pem-
ilih kepada dua hal. Yakni, meng-
gedepankan, keunggulan calon
yang kita dukung dan menjelek-
jelekan lawan politik.

Eksesnya, model kampanye se-
perti itu berdampak pada me-
nurunnya daya tarik pemilu untuk
berpartisipasi dan terlibat aktif
dalam kontestasi politik, baik di
aras lokal maupun pusat.

Dalam historiografi politik In-
donesia, model kampanye pem-
ilihan umum (pemilu), baik
legislatif maupun eksekutif baik
era Orde Lama maupun Orde Baru,
lebih banyak menggambarkan
model kampanye dalam bentuk
pawai bersama, pidato politik, apel
akbar, dan arak-arakan.

Pelibatan para figur publik seperti

pejabat serta kaum pesohor sebagai
bintang kampanye akhirnya men-
jadi ciri khas kampanye era 1970-an
(Danial, 2009). Artinya, kampanye
saat itu belum dijadikan ajang
untuk menyampaikan berbagai
program partai politik secara jelas
dan tuntas kepada pemilih.

Kalaupun ada, itu lebih bersifat
pertunjukan tanpa makna dan
ajang obral janji-janji politik oplos-
an. Sedangkan di era reformasi,
model kampanye lebih didominasi
fenomena "Amerikanisasi". Misal-
nya, perang antar lembaga survei, kon-
sultan politik, hingga ruang publik
harus disesaki beragam bentuk ba-
liho dan spanduk.

Kampanye Kreatif

Dalam konteks pilkada serentak
2015, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) berniat menjadikan ritua-
l kampanye sebagai ajang
pendidikan politik dengan cara
membatasi pemasangan alat peraga
kampanye. Peraga kampanye yang
boleh dipasang hanyalah yang telah
disediakan KPU daerah, termasuk
dalam bentuk media luar ruangan
maupun iklan media massa cetak
maupun elektronik.



O l e h

BAMBANG ARIANTO*

Untuk media sosial, KPU hanya
memperbolehkan satu akun un-
tuk Facebook, Twitter, dan media
sosial lainnya. Lalu, alat peraga
yang boleh dibuat oleh tim kan-
didat politik hanya berupa kaus,
topi, mug, kalender, kartu nama,
pin, pulpen, payung, dan stiker
maksimal berukuran 10 x 5 cm.

Fakta tersebut menegaskan sem-
akin sempitnya media alat peraga
kampanye. Karena itu, para kandidat
politik harus dapat menyikapi
dengan kreatif agar alat peraga
tetap dapat memengaruhi pemilih
tanpa harus melanggar regulasi yang
sudah ditentukan KPU.

Alternatif terbaik adalah mengem-
mas alat peraga kampanye dengan
nilai-nilai kreativitas agar kemudian

menjadi model kampanye kreatif.
Tujuannya, kampanye dapat
efisien, efektif, dan dapat diterima
khalayak umum. Dalam konteks ini,
kampanye kreatif merupakan proses
yang dirancang sebagai komunikasi
politik dengan cara-cara yang unik,
jenaka, pelesetan, dan humor.

Kampanye kreatif ditujukan
untuk memberikan kesadaran
kepada publik bahwa kontestasi
politik merupakan momen yang
menyenangkan dan kesukariaan
yang dapat melahirkan kegembira-
raan politik.

Kegembiraan politik yang di-
maksudkan adalah mengemba-
likan tujuan luhur dari politik
guna memberikan pencerahan
dan mengarahkan masyarakat
ke hidup yang lebih baik dengan
penuh pengorbanan dan tidak
hanya berhenti pada kalkulasi un-
tungan rugi.

Itu mengapa, pada kontestasi
presidensial 2014, kita banyak me-
nemui model kampanye kreatif
yang digagas para relawan politik
seperti video, musik, game, dan
desain grafis. Bahkan, kontestasi
presidensial 2014 merupakan
ritus kampanye yang paling kreatif

sepanjang sejarah.

Epilog

Pada akhirnya, bila kemudian
kita ingin mengembalikan hakikat
kampanye sebagai wahana edukasi
dan pendidikan politik, sejatinya
kehadiran kampanye kreatif mutlak
diperlukan. Kampanye kreatif di-
harapkan dapat menggiring la-
hirnya model kampanye yang lebih
transformatif, yakni kampanye
yang mengedepankan pendekatan
modern berbasis literasi politik.

Wallhasil, mengedepankan
kampanye kreatif diyakini dapat
menggaet pemilih mengambang
(*swing voters*) dan pemilih yang
belum menentukan pilihannya
(*undecided voters*) untuk segera
beralih dari pemilih tradisional
menuju pemilih rasional.

Sekaligus, penanda bila ritua-
l pilkada serentak pada 9 De-
seMBER 2015 merupakan wahana
pembelajaran politik yang menarik,
asyik, dan tentunya menghibur. (*)

* Direktur Riset Bulaksumur
Empat, mahasiswa S-2 Jurusan
Politik dan Pemerintahan
(IPP) Fisipol UGM Jogjakarta

Sekolah sebagai Ruang Dialog

INDONESIA merupakan negara
dengan karakteristik masyarakat
yang sangat beragam. Negara yang
dibangun oleh keragaman kelas
sosial ekonomi, budaya, bahasa,

rena itu, membangun kebiasaan
menyelesaikan setiap permasalahan
melalui dialog menjadi kebutuhan
yang sangat mendasar. Sekolah men-
jadi salah satu ruang yang dapat diop-



maupun agama yang lebih beragam
memegang peranan penting dalam
menginternalisasi kemampuan ber-
dialog dengan beragam kalangan.
Para peserta didik di sekolah negeri
memiliki kesempatan yang lebih

schari-hari mereka.

Ruang kelas harus menjadi arena kon-
testasi atau pergulatan ide. Pemikiran
tiap peserta didik harus dihargai oleh
seluruh elemen kelas. Pembelajaran
harus menjadi peserta didik untuk